

Judul : Mangrove Ditebang, Dibikin Arang, Diekspor : 9 Perusahaan Perusak Hutan Di Panggil Senayan
Tanggal : Selasa, 29 Agustus 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Mangrove Ditebang, Dibikin Arang, Diekspor

9 Perusahaan Perusak Hutan Dipanggil Senayan

Komisi IV DPR menghadirkan sembilan perusahaan perambah hutan lindung dan hutan mangrove atas dugaan pelanggaran hukum merusak lingkungan.

KETUA Komisi IV DPR Sudin mengatakan, perusahaan-perusahaan ini dihadirkan DPR untuk memberikan klarifikasi atas kegiatan eksplorasi ilegal di hutan mangrove di Kepulauan Riau (Kepri). Beberapa perusahaan ini ditengarai menebang pohon mangrove untuk dijadikan sebagai bahan baku arang. Arang ini kemudian diekspor ke berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, dan Jepang.

Menurut Sudin, temuan kegiatan ilegal ini berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR ke Kepri (5-7/7) di Batam, Kepri. "Ditemukan produk arang ilegal di Pulau Galang hingga Pulau Lingga dan sekitarnya. Bahan bakunya dari pohon mangrove dengan usia pohon yang diperkirakan 50 tahun,"

kata dia di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Produk arang dari pohon mangrove tersebut, sambung Sudin, sudah dalam bentuk kemasan batangan yang disimpan dalam gudang dan siap didistribusikan atau diekspor. Diduga kuat, pelaku ekspor arang ini tidak memiliki izin ekspor. Sehingga ada indikasi pelanggaran hukum dari pelaku usaha tersebut.

Sudin menilai, kegiatan usaha para pengusaha ini telah mencederai upaya Pemerintah untuk rehabilitasi kawasan mangrove. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 triliun yang bersumber dari badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang tersebar di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Atas temuan tersebut dilakukan penyegekan oleh Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP dan Ditjen Penegakan Hukum KLHK atas semua kegiatan yang patut diduga melanggar hukum," ujarnya.

Sudin mengaku muris atas kegiatan perambahan hutan mangrove di Batam ini. Apalagi kegiatan penebangan yang dilakukan para pengusaha ini justru tidak jauh dari lokasi Presiden Jokowi melakukan tanam mangrove di Pulau Setokok. Pulau ini dekat dengan Jembatan Bareleng, obyek wisata terkenal di Batam.

"Presiden Jokowi menanam mangrove hujan-hujan, sementara di tempat lain tak jauh dari lokasi tersebut, orang lain menebang mangrove untuk mendapatkan arang. Padahal Presiden sengaja membentuk Badan Restorasi Mangrove dan

Gambut karena untuk kelestarian laut," tegasnya.

Sudin mengatakan, akibat penebangan secara liar ini, Kepri kehilangan sekitar 47 persen dari total 382 kawasan hutan yang dimilikinya. Hilangnya hutan mangrove ini juga disebabkan oleh kegiatan penimbunan untuk dijadikan sebagai kawasan tujuan investasi di Kota Batam, Bintang, dan Karimun.

"Pada tiga daerah tersebut terjadi deforestasi berbagai kepentingan baik secara legal maupun ilegal. Di antaranya untuk kawasan industri, permukiman, perkebunan, pertambangan, pertanian, hingga pertambangan," tambahnya.

Sementara anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengingatkan para pelaku usaha untuk melengkapi seluruh dokumen perizinan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Hal ini penting agar pelaku usaha terhindar dari masalah hukum.

Dia pun mengaku heran, ada pengusaha yang bisa melakukan kegiatan usaha sementara sama sekali tidak dibekali dokumen. "Jadi jangan sampai ada kucing-kucingan antara pengusaha dan pemberi izin. Karena yang terjadi saat ini, pengusaha bayar dulu, SK-nya menyusul," ujarnya.

Dia pun mengingatkan di Undang-Undang Lingkungan Hidup ada pengaturan sanksi kepada pelaku perusak lingkungan hidup. Sanksi tersebut mulai dari administrasi, sanksi ringan, hingga pidana. "Yang saya khawatirkan kalau pebisnis terpidana, maka dunia usaha bisa terpuruk. Jangan sampai pelaku usaha masuk bui," tegasnya.

Makanya, dia meminta agar pelaku usaha sadar hukum. Komisi IV DPR hadir untuk membantu meluruskan dan mencari solusi agar kegiatan tersebut benar-benar berdasar aturan. ■ KAL